

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH 2020-2022

Daftar Isi

I. Pendahuluan.....	2
II. Proses Penyusunan RAN OGI VI Tahun 2020-2022.....	2
III. Rekomendasi IRM untuk RAN OGI VI Tahun 2020-2022.....	5
IV. Pelaksanaan Rencana Aksi	10
V. Pembelajaran	28
VI. Rekomendasi	28

I. Pendahuluan

Dorongan masyarakat untuk menghadirkan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif, dan inklusif menjadikan keterbukaan pemerintah merupakan elemen penting yang harus dikedepankan. Upaya keterbukaan pemerintah didorong melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, langkah progresif lainnya pada tahun 2011 Indonesia menjadi salah satu dari delapan negara pendiri inisiatif keterbukaan pemerintah dalam tingkat global, *Open Government Partnership* (OGP). Melalui keanggotaannya dalam OGP, Pemerintah Indonesia melaksanakan inisiatif keterbukaan pemerintah melalui penyusunan, implementasi, pengawasan dan evaluasi terkait Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) secara periodik.

Pada tahun 2020, Indonesia telah selesai menyusun RAN OGI VI untuk Periode 2020-2022. Rencana aksi tersebut terdiri atas 18 Komitmen dan 67 Ukuran Keberhasilan (*Output*) yang dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 22 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Komitmen-komitmen tersebut disusun melalui proses ko-kreasi antara pemerintah dengan perwakilan masyarakat sipil untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah yang berlandaskan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas.

RAN OGI VI tahun 2020-2022 memiliki tiga fokus utama, yaitu keterbukaan data, peningkatan akses terhadap keadilan, dan penanganan pandemi COVID-19. Ketiga fokus tersebut disusun berdasarkan urgensi pada periode pelaksanaan yang bersamaan dengan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, RAN OGI VI tahun 2020-2022 memiliki tema besar, yaitu Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca terjadinya wabah COVID-19.

II. Proses Penyusunan RAN OGI VI Tahun 2020-2022

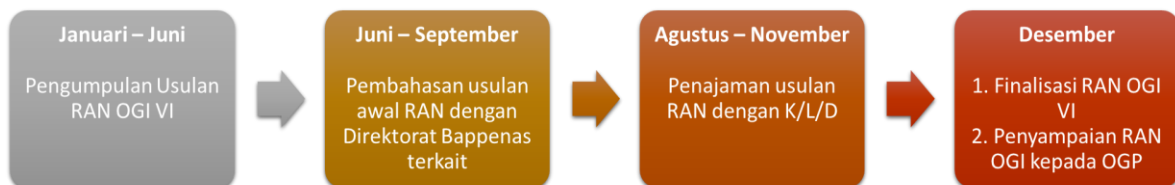
1. Proses Ko-kreasi Penyusunan RAN OGI VI

RAN OGI VI tahun 2020-2022 disusun melalui proses ko-kreasi antara K/L dengan OMS untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah. Secara garis besar, perumusan RAN OGI VI tahun 2020-2022 dibagi ke dalam empat tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan usulan awal RAN OGI yang berasal dari OMS. Tahapan ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari Januari hingga Juni 2020. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan usulan tersebut adalah terdapatnya 25 usulan komitmen keterbukaan pemerintah yang diajukan oleh OMS. Sebagai bentuk tindak lanjut, pada setiap proposalnya dilakukan pertemuan bilateral untuk memperdalam usulan OMS.

Tahapan kedua adalah pembahasan usulan awal RAN OGI dengan direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Tahapan ini mempunyai tujuan untuk menyinergikan RAN OGI dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahapan ini berlangsung selama 4 bulan yakni di bulan Juni hingga September 2020. Tahapan ketiga berlangsung di bulan Agustus hingga November yakni pembahasan usulan RAN OGI antar Kementerian/Lembaga dan OMS yang terkait.

Tahapan keempat adalah *workshop* finalisasi usulan RAN OGI dengan Kementerian/Lembaga terkait. Tahapan ini terdiri dari kegiatan berseri yang dilaksanakan pada tanggal 11, 14, dan 15 Desember 2020. Pada tanggal 11 Desember Sekretariat Nasional OGI mengadakan Multi-Stakeholder Forum yang mengundang seluruh Kementerian/Lembaga dan OMS yang terlibat dalam penyusunan RAN OGI. Sedangkan tanggal 14 dan 15 Desember, merupakan *workshop* finalisasi usulan RAN OGI dengan mengundang Kementerian/Lembaga, direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas, dan OMS. Hasil dari *workshop* finalisasi ini adalah kesepakatan bersama antara Kementerian/Lembaga dan OMS untuk melaksanakan 18 komitmen untuk RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

Gambar 1. Proses Penyusunan RAN OGI VI Tahun 2020-2022



2. Pemantauan dan Evaluasi RAN OGI VI Tahun 2020-2022

a. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan RAN OGI VI tahun 2020-2022 memiliki skema yang sedikit berbeda dengan mekanisme di periode-periode sebelumnya. Pada skema sebelumnya, hanya Kementerian/Lembaga yang melaporkan kegiatan ko-kreasi per triwulan ke dalam Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP). Namun, capaian kegiatan tidak dapat diakses oleh publik sehingga unsur keterbukaan dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pada periode 2020-2022, ringkasan capaian kegiatan di SISMONEV KSP akan disajikan pula di website OGI (www.ogi.bappenas.go.id) yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

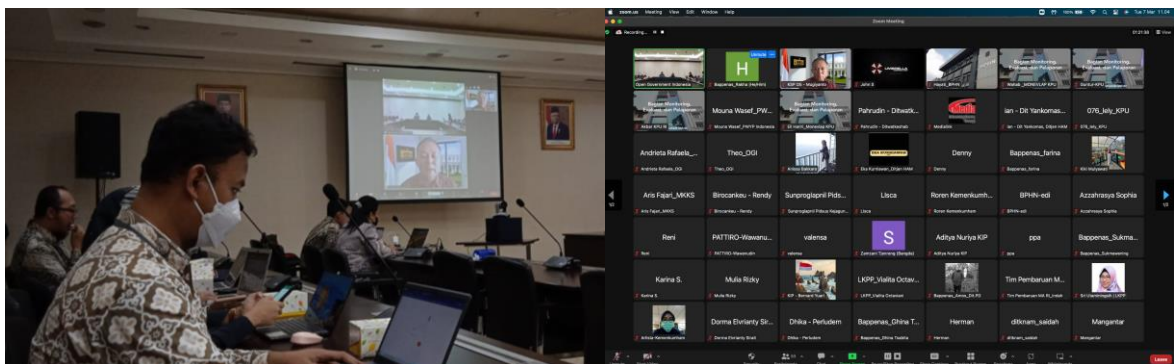
Periode pelaporan kegiatan dan capaian masing-masing instansi yang semula dilakukan setiap triwulan diubah menjadi per semester. Dengan kata lain, ada empat kali pelaporan yang dilakukan selama dua tahun. Hal ini bertujuan agar Kementerian/Lembaga lebih fokus dalam implementasi RAN dan dapat menghasilkan keluaran yang lebih berdaya ungkit.

Selain itu, OMS juga melaporkan kegiatan ko-kreasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi yang ada di website OGI. Dengan adanya laporan baik dari Kementerian/Lembaga dan OMS, diharapkan publik dapat melihat secara detail skema ko-kreasi yang telah dijalankan selama pelaksanaan RAN OGI VI tahun 2020-2022. Dengan begitu, proses pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat terlihat dengan jelas.

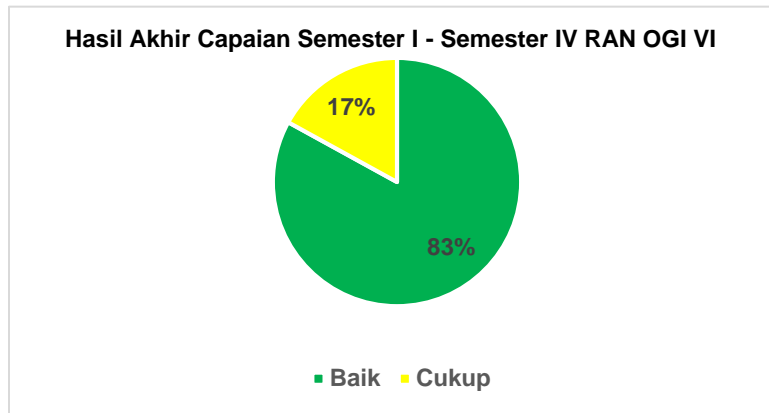
b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAN OGI VI Tahun 2020-2022

Sepanjang perjalanan implementasi RAN OGI VI, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap semester, dengan tujuan untuk mengukur capaian dari masing-masing komitmen yang dijalankan oleh *stakeholder* pelaksana. Adapun *stakeholder* pelaksana di dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022 terdiri atas 18 Kementerian/Lembaga dan 22 Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam keberjalanan RAN OGI VI, telah dilakukan 4 (empat) kali pemantauan dan evaluasi dari Semester I hingga Semester IV yang memiliki hasil akhir sebagai berikut:

Gambar 2. Kegiatan Multi-Stakeholder Forum RAN OGI VI 2020-2022



Gambar 3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAN OGI VI 2020-2022



Dari hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi, 83% komitmen atau sejumlah 15 komitmen mendapatkan nilai baik yang menunjukkan bahwa komitmen telah mencapai target dan terlaksana dengan baik. Sementara itu, 17% komitmen atau sejumlah 3 komitmen mendapatkan nilai cukup yang menunjukkan bahwa target capaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari masing-masing *stakeholder* pelaksana. Pada prinsipnya, hasil pemantauan dan evaluasi akan selalu didiseminasikan kepada pemangku kepentingan dalam *Multi-Stakeholder Forum*, yang dilaksanakan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu tahun. Dalam konteks penyampaian hasil akhir capaian RAN OGI VI tahun 2020-2022, Sekretariat OGI telah mendiseminasikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut melalui pelaksanaan MSF pada tanggal 7 Maret 2023.

III. Rekomendasi IRM untuk RAN OGI VI Tahun 2020-2022

1. Memperluas Informasi pada Website Open Government Indonesia

Sekretariat Open Government Indonesia telah memiliki peningkatan terkait jumlah publikasi informasi kegiatan di portal www.ogi.bappenas.go.id. Namun, lebih dari itu Sekretariat Open Government Indonesia diharapkan untuk melengkapi beberapa informasi terkait lainnya sesuai dengan standar partisipasi dan ko-kreasi OGP, yaitu:

- a. Mempublikasikan standar aturan *Multi-Stakeholder Forum* (MSF) yang terdiri dari tugas dan fungsi, struktur, dan juga dokumentasi pertemuan MSF;
- b. Memperbarui repositori setidaknya setiap enam bulan untuk memastikan informasi implementasi dan ko-kreasi dapat diperbaharui dan diakses oleh masyarakat;
- c. Mempublikasikan lini masa ko-kreasi dan gambaran umum terkait kesempatan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam RAN OGI setidaknya dua minggu sebelum proses penyusunan rencana aksi dimulai;

d. Mempublikasikan seluruh masukan yang diterima dari setiap pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana aksi.

Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, Sekretariat Open Government Indonesia telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi di atas. Sekretariat OGI selalu memperbaharui hasil repositori dari kegiatan Sekretariat maupun implementasi RAN OGI dalam fitur [kalender](#) dan [perkembangan komitmen](#). Dalam proses penyusunan, Sekretariat OGI telah membuka [lini masa \(timeline\) penyusunan RAN OGI VII](#) serta daftar usulan yang diajukan oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan komentar pada laman tersebut.

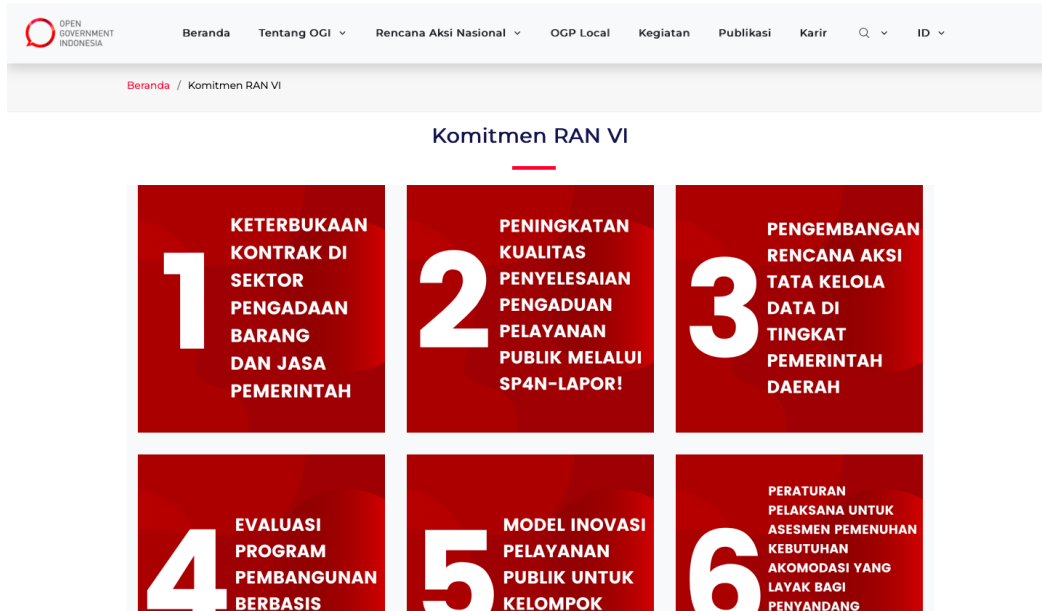
Gambar 4. Fitur Kalender dan Berita Kegiatan pada Situs OGI

The image shows a screenshot of the OGI website interface. On the left, there is a calendar titled "Agenda Kegiatan" for "February 2023". The calendar grid shows dates from 29 to 11. Several dates have blue event markers: Wednesday 1st (Peluncuran RAN OGI), Tuesday 6th (Satu Dasawarsa OGI), Thursday 8th (Rapat Dewan Pengarah OGI), and Thursday 15th (Penyusunan RAN OGI). On the right, there is a "Berita Terkini" (Latest News) section with a dark red background. It features three news items, each with a small image, a title, and a date:

- Satu Dasawarsa OGI dan Peluncuran RAN OGI VII** (07-02-2023)
- Rapat Dewan Pengarah OGI** (24-01-2023)
- Verifikasi & Penelaahan Akhir RAN VII OGI** (08-12-2022)

At the bottom right of the news section, there is a link that says "Selengkapnya >".

Gambar 5. Halaman Perkembangan Pelaksanaan Komitmen RAN OGI VI

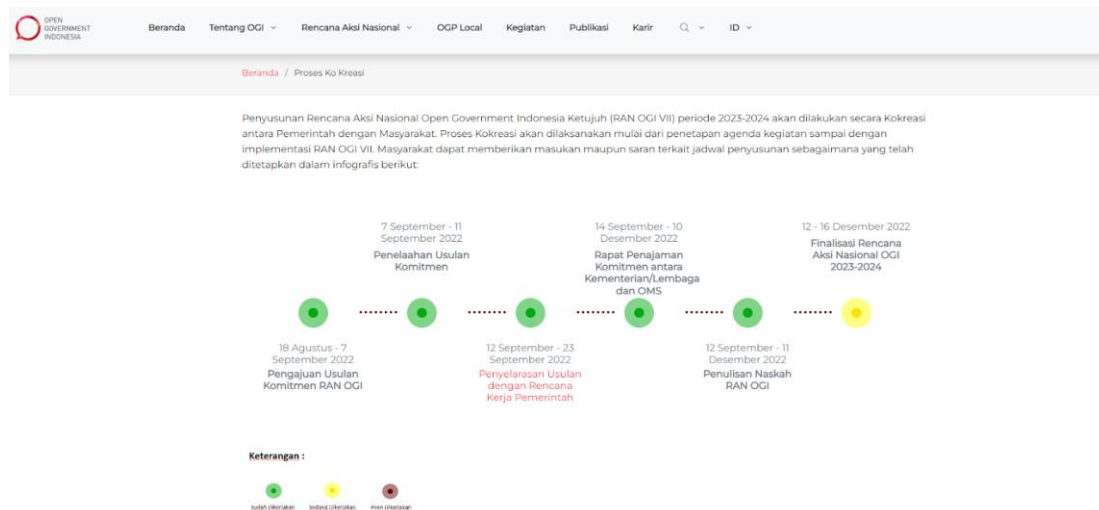


Gambar 6. Contoh Perkembangan Implementasi Komitmen: Komitmen 6

Implementasi Komitmen

Ukuran Keberhasilan 2020-2022	Status	Data Dukung
1. Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung.	Sedang Berjalan	Data Dukung B06 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/znWZ83YR6pgiZrT Data Dukung B12 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Vg93PNaRm0SuyZR Data Dukung B18 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/RIpUFEAhahpVz
2. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan.	Sedang Berjalan	Data Dukung B06 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/znWZ83YR6pgiZrT Data Dukung B12 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Vg93PNaRm0SuyZR Data Dukung B18 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/RIpUFEAhahpVz
3. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.	Sedang Berjalan	Data Dukung B06 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/znWZ83YR6pgiZrT Data Dukung B12 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Vg93PNaRm0SuyZR Data Dukung B18 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/RIpUFEAhahpVz
4. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.	Sedang Berjalan	Data Dukung B06 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/znWZ83YR6pgiZrT Data Dukung B12 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Vg93PNaRm0SuyZR Data Dukung B18 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/RIpUFEAhahpVz
5. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan pemenuhan asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan.	Sedang Berjalan	Data Dukung B06 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/znWZ83YR6pgiZrT Data Dukung B12 https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Vg93PNaRm0SuyZR

Gambar 7. Lini Masa Penyusunan RAN OGI VII



2. Meningkatkan Representasi Masyarakat Sipil dalam Susunan Anggota Dewan Pengarah

Susunan anggota Dewan Pengarah Open Government Indonesia saat ini terdiri atas tujuh perwakilan Kementerian/Lembaga dan satu perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). IRM merekomendasikan untuk meningkatkan representasi masyarakat sipil dalam susunan anggota dewan pengarah sebagai bentuk peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan, implementasi, dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Hal ini dapat mendukung dalam identifikasi isu-isu publik dan mendorong penyelesaian masalah secara bersama atau secara partisipatif.

Dalam upaya menindaklanjuti masukan tersebut, Sekretariat OGI telah melakukan serangkaian [pertemuan dengan anggota Dewan Pengarah saat ini](#). Berdasarkan hasil pertemuan, susunan anggota Dewan Pengarah terkini akan segera diperbaharui dan dilakukan penyusunan untuk memperbarui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang susunan Tim Pelaksanaan Open Government Indonesia.

3. Melibatkan Representasi Pimpinan dari Perwakilan Pemerintah dalam Ko-kreasi

Dalam penyusunan RAN OGI VII, IRM merekomendasikan dalam proses ko-kreasi untuk dapat melibatkan pengambil keputusan dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman penyusunan dua rencana aksi sebelumnya yang terdapat kendala pada tidak adanya perwakilan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan selama proses penyusunan rencana aksi. Pelibatan pimpinan dari representasi pemerintah dapat membantu proses penyusunan untuk memberikan

masukan terkait kondisi terkini dan target-target yang memungkinkan untuk dicapai selama proses penyusunan.

Sekretariat OGI telah berupaya untuk melibatkan pimpinan tinggi dari masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mendorong komitmen dan ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengundang seluruh pimpinan tinggi Kementerian/Lembaga dalam kegiatan Peluncuran RAN OGI VII yang telah dipublikasikan melalui [website](#) dan [media sosial Open Government Indonesia](#).

Gambar 8. Kegiatan Launching RAN OGI VII



4. Menyusun Target Komitmen yang Konkrit dan Ambisius

Penyusunan RAN OGI VI memiliki topik yang sangat beragam, tetapi target dari setiap komitmen yang ditetapkan belum ambisius dan juga konkrit. Untuk rencana aksi selanjutnya, IRM merekomendasikan untuk dapat memiliki target-target yang konkrit atau pun jelas, selaras dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu IRM juga merekomendasikan keterlibatan ahli maupun akademisi untuk membantu menyusun target-target komitmen yang jelas dan konkrit.

Sekretariat OGI telah menindaklanjuti rekomendasi dari IRM melalui rapat-rapat penyusunan RAN OGI VII. Dalam rapat penyusunan RAN OGI VII, Sekretariat OGI telah memberikan masukan-masukan untuk mempertajam target dari setiap komitmen. Namun, dalam menindaklanjuti rekomendasi ini, Sekretariat OGI belum melibatkan akademisi dalam pembahasan target, tetapi telah melibatkan akademisi dalam memberikan [masukan terkait isu-isu strategis RAN OGI VII](#).

IV. Penilaian Pelaksanaan Rencana Aksi

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
<p>Komitmen 1: Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah telah berhasil diterbitkan. 2. Telah tersusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang memiliki indikator transparansi dalam bidang dunia usaha dengan sub-indikator keterbukaan informasi PBJ Pemerintah. 3. Telah tersedia fitur pencatatan pengadaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penyempurnaan portal pengadaan darurat salah satunya dengan memberikan masukan mengenai elemen-elemen penting dalam <i>dashboard</i> PBJ Darurat. 2. Terbitnya revisi PERKI SLIP yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi terhadap peraturan tersebut telah dilaksanakan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan ICW melalui diskusi publik dan 	<p>Masih terdapat beberapa komponen informasi yang seharusnya ditampilkan di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat LKPP kaji kembali.</p> <p>Setelah dimasukkannya sub-indikator keterbukaan informasi PBJ Pemerintah di dalam IKIP. KIP juga sudah mulai memasukan aspek PBJ dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, review terhadap indikator PBJ dalam Monev Keterbukaan Informasi</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>darurat pada SPSE versi 4.5 (contohnya platform LPSE Provinsi Jawa Barat, LPSE Provinsi Jawa Timur, LPSE Provinsi Bali, LPSE Kabupaten Buleleng, dan LPSE Kabupaten Ponorogo).</p>	<p>penyelenggaraan sesi webinar di <i>Open Government Week</i>.</p>	<p>Publik perlu untuk dilakukan dengan menyesuaikan pada karakteristik badan publik.</p>
<p>Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 113.989 laporan yang diterima melalui SP4N-LAPOR! Pada tahun 2022, sebanyak 84,46% jumlah laporan telah ditindaklanjuti oleh instansi penerima laporan. Laporan ditindaklanjuti terdiri dari laporan dengan status proses (6,62%), selesai (42,52%), dan diarsipkan (35,32%). 2. Jumlah K/L/PD yang telah melakukan tindak lanjut lebih dari 45% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN dan RB bersama dengan PATTIRO telah menyelesaikan seluruh ukuran keberhasilan dalam komitmen tersebut. 2. Nilai tindak lanjut dari Kementerian PAN dan RB terhadap laporan telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 45%. Selain itu, jumlah K/L/D yang telah menindaklanjuti laporan mencapai lebih dari 45% yaitu sejumlah 458 dari 	<p>Untuk memaksimalkan dampak pelaporan dari masyarakat melalui SP4N-LAPOR! Kementerian PAN dan RB diharapkan dapat mengedepankan jumlah laporan yang diselesaikan, tidak hanya jumlah tindak lanjut laporan.</p> <p>Hal tersebut dikarenakan jumlah laporan yang diselesaikan akan membuktikan responsivitas K/L/D untuk</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>dari keseluruhan laporan yang diterima yakni sebesar 458 (66,15%) dari 703 K/L/PD.</p> <p>3. Rekapitulasi laporan dan informasi terkait pengaduan publik dapat diakses melalui laman SP4N LAPOR!</p>	<p>703 K/L/D atau sebesar 66,15%.</p> <p>3. Kementerian PAN dan RB juga telah membuka statistik laporan dari SP4N-LAPOR! kepada publik melalui laman yang telah disediakan.</p>	<p>memberikan respon atas laporan masyarakat.</p>
<p>Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintah Daerah</p>		<p>Telah dilaksanakan penyusunan, penetapan draft, dan implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project.</p>	<p>Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil telah melakukan asesmen dan juga menyusun Rencana Aksi Satu Data di masing-masing daerah <i>pilot project.</i></p>	<p>Untuk memaksimalkan Rencana Aksi Satu Data yang telah disusun Sekretariat SDI dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah, diperlukan penyusunan produk hukum untuk menguatkan dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data di masing-masing daerah.</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan bimbingan teknis melalui <i>pilot project</i> di Desa Guwosari dan Sriharjo yang diselenggarakan Yayasan Tifa dengan keterlibatan dari Kementerian Desa PDTT. 2. Telah dilaksanakan fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi kepala desa, pemerintah desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). 3. TIFA telah melaksanakan <i>pilot project</i> evaluasi program pembangunan masyarakat pada Desa Guwosari dan Desa 	<p>Yayasan TIFA telah melaksanakan <i>Program Review</i> (Program Pembangunan Berbasis Masyarakat) di dua desa piloting, yaitu Desa Guwosari dan Desa Sriharjo. Dalam pelaksanaan Program Review, Yayasan TIFA telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>Pelaksanaan piloting berhasil dilakukan dimana dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut, serta ditindaklanjutinya hasil <i>Program Review</i> oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pelaksanaan <i>Program Review</i> perlu dipastikan keberlanjutannya melalui upaya atau dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia di desa.

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		Sriharjo yang diikuti oleh Kementerian Desa PDTT.		
Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal		Telah dilaksanakan diseminasi konsep Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bulukumba, Nias Utara, dan Merauke.	Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Lakpesdam PBNU telah melaksanakan diseminasi terkait dengan konsep pelayanan publik bagi kelompok marjinal.	Diseminasi terkait dengan konsep pelayanan publik bagi kelompok marjinal perlu menemukan fokus pemberdayaan sesuai dengan potensi yang terdapat pada masing-masing daerah <i>pilot project</i> .
Komitmen 6: Peraturan Pelaksana untuk Asesmen Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung menerbitkan peraturan teknis berupa SK Ditjen Badilum, SK Ditjen Badilag, dan SK Ditjen Badmiltun, serta mengumpulkan laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SK Ditjen Badilag. 2. Kejaksaan Agung telah menyusun draf peraturan Kejaksaan RI 	<p>Komitmen mendapatkan nilai capaian baik karena Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Ditjenpas telah berhasil menerbitkan peraturan pelaksana dan mengumpulkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.</p> <p>Selain itu, draf peraturan Kejaksaan RI telah selesai disusun dan sedang dalam</p>	<p>Penerbitan, sosialisasi, dan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan menjadi bagian dari aksi dalam RAN OGI VII. Kepolisian RI akan melanjutkan proses finalisasi draf dengan Pusham UII.</p> <p>Ke depannya, perlu ada pemetaan yang lebih baik dan akurat terkait <i>timeline</i></p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>terkait Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan.</p> <p>3. Kepolisian RI membuat draf peraturan teknis.</p> <p>4. Ditjenpas menerbitkan peraturan teknis dan mengumpulkan laporan hasil evaluasi peraturan teknis di wilayah <i>piloting.</i></p>	<p>proses penandatanganan yang dijadwalkan telah dapat diterbitkan pada Kuartal pertama di tahun 2023. Begitu pun dengan Kepolisian RI, meskipun masih belum dapat menerbitkan peraturan teknis, draf sudah tersedia dan dapat diangkat pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan komitmen juga melibatkan masyarakat sipil dalam proses ko-kreasi.</p>	<p>penerbitan peraturan serta identifikasi bentuk peraturan yang tepat.</p>
<p>Komitmen 7: Penguatan Portal Informasi Bantuan Hukum</p>		<p>1. BPHN memiliki portal SIDBANKUM.</p> <p>2. Terdapat laporan hasil diskusi sebagai tindak lanjut MoU pengembangan portal informasi bantuan hukum terintegrasi.</p> <p>3. Telah dilaksanakan survei kebutuhan hukum untuk</p>	<p>Komitmen mendapatkan nilai capaian cukup karena telah ada upaya penguatan portal informasi bantuan hukum, antara lain pemetaan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam menerima informasi terkait bantuan hukum, dan pembahasan antar BPHN dan MA untuk integrasi portal</p>	<p>Komitmen akan kembali diangkat pada RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Namun, capaian akhir akan disepakati antar pihak setelah diskusi pada periode B06 dan B12, di mana OMS akan melakukan penelitian terlebih dahulu dan BPHN serta MA akan melakukan</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		mendukung penguatan pemberian informasi terkait bantuan hukum.	sesuai MoU yang dikembangkan pada 2016. Akan tetapi, nilai capaian tidak sempurna karena capaian akhir yakni integrasi dan evaluasi integrasi portal informasi bantuan hukum belum terlaksana. Komitmen ini dapat dilanjutkan pada RAN OGI berikutnya.	pemetaan urgensi di lapangan. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan RAN OGI VI, yang pada saat itu fokus komitmennya adalah integrasi portal di saat ada isu-isu lain yang sebenarnya lebih urgen pada lapangan, hal ini membuat integrasi pada akhirnya belum dapat direalisasikan.
Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum		1. Telah dilakukan verifikasi dan akreditasi PBH baru periode 2022-2024, dan tersedianya rekomendasi tentang proses verifikasi dan akreditasi dalam rangka meningkatkan jumlah dan sebaran PBH.	Komitmen mendapatkan nilai capaian baik karena capaian akhir berhasil tercapai. Layanan bantuan hukum telah diperluas dengan adanya evaluasi dan rekomendasi untuk proses verifikasi dan akreditasi PBH, peningkatan kapasitas layanan dengan memberikan training paralegal, serta	Untuk melanjutkan upaya perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum, RAN OGI VII mengangkat komitmen untuk mengembangkan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum. Hal ini bertujuan agar standarisasi pelayanan

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>2. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri tersebut.</p> <p>3. Telah terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum dan tersedianya laporan evaluasi implementasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.</p>	<p>penerapan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen juga dilakukan secara ko-kreasi antar unsur Pemerintah dan Masyarakat Sipil.</p>	<p>lebih seragam antar PBH, dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat rentan.</p> <p>Lebih lanjut, RAN OGI VII 2023-2024 juga akan mendorong komitmen untuk memperluas cakupan definisi dari “masyarakat rentan” melalui revisi UU Bantuan Hukum.</p>
Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian		<p>1. Telah terdapat langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan,</p>	<p>Komitmen mendapatkan nilai capaian baik karena komitmen untuk mewujudkan inklusi kelompok rentan dan gender dalam pemberian</p>	<p>RAN OGI VII mengangkat komitmen untuk mengembangkan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum.</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
Bantuan Hukum bagi Korban		<p>berupa kurikulum pendidikan yang tertuang dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal serta pengawasan pelaksanaan kurikulum untuk korban rentan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum.</p> <p>2. Telah dilaksanakan pelatihan bagi paralegal di beberapa wilayah bagi PBH terakreditasi untuk pemberian layanan yang berperspektif korban dan sensitif terhadap kelompok rentan dan gender.</p> <p>3. Telah dilaksanakan Survei Kebutuhan</p>	bantuan hukum bagi korban terlaksana dengan adanya langkah kebijakan, pelatihan paralegal, dan pemetaan keadaan di lapangan melalui survei.	Hal ini bertujuan agar standardisasi pelayanan lebih seragam antar PBH, dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat rentan.

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		Hukum Kelompok Rentan .		
Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN telah memberikan rekomendasi atas hasil kajian yang telah dilakukan untuk pemberian bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi. 2. KIP telah menyediakan data sengketa informasi. 3. OMS telah menyusun kajian tentang pemberian bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi. 	Komitmen belum dapat terlaksana sepenuhnya karena dua alasan utama, yakni penempatan tugas kurang tepat kepada pemangku kepentingan sehingga ada target capaian yang di luar tugas dan fungsi pemangku kepentingan, serta kurangnya sumber daya pelaksana komitmen.	Kedepannya, perlu ada proses ko-kreasi yang lebih baik dan diskusi mendalam sejak tahap penyusunan rencana aksi, agar tidak ada muatan dalam rencana aksi yang sebenarnya tidak sejalan dengan tugas dan fungsi K/L maupun OMS. Sejak saat proses penyusunan, pemangku kepentingan juga harus mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan komitmen, agar komitmen berjalan dari awal hingga akhir periode.
Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi DTKS dengan BPNT, PKH, dan BST. Telah terdapat aplikasi SAGIS untuk verifikasi 	Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dilakukan oleh Kementerian Sosial yang juga mengembangkan platform	Kementerian Sosial perlu meningkatkan ko-kreasi dengan MediaLink selaku mitra Organisasi Masyarakat Sipil untuk

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
Program-program Kesejahteraan		<p>dan validasi data Penerima Manfaat.</p> <p>2. Transparansi bantuan sosial dapat diakses melalui cekbansos kemensos dan layanan pengaduan terkait Bansos dapat diakses melalui aplikasi Usul-Sanggah.</p>	<p>Usul-Sanggah untuk memastikan keakuratan data dari setiap DTKS.</p> <p>Melalui pengembangan-pengembangan tersebut, transparansi, keakuratan, dan partisipasi masyarakat untuk menjamin keabsahan data DTKS menjadi lebih terbuka.</p>	<p>menerima masukan-masukan terkait program DTKS.</p>
Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan di Desa		<p>1. Telah terlaksana akuntabilitas sosial melalui kegiatan diseminasi uji coba score card di 320 desa.</p> <p>2. Telah dilaksanakan Pelatihan Aparatur Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>3. Telah terlaksana replikasi akuntabilitas</p>	<p>Kementerian Desa PDTT telah melakukan uji coba <i>score card</i> sebagai salah satu upaya untuk menjalankan nilai-nilai akuntabilitas di desa. Uji coba ini dilaksanakan Kementerian Desa PDTT di 320 Desa di Indonesia.</p> <p>Selain itu, dalam mendukung upaya pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa, Kementerian Dalam Negeri melakukan pelatihan untuk aparatur desa sebagai upaya</p>	<p>Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Wahana Visi Indonesia perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan terkait akuntabilitas sosial sebagai upaya meningkatkan dampak yang dibawa oleh Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Wahana Visi Indonesia.</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>sosial suara dan aksi warga/citizen voice action di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan.</p>	<p>meningkatkan kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan akuntabilitas desa.</p> <p>Wahana Visi Indonesia juga telah melaksanakan program suara dan aksi warga sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa melalui program tersebut.</p>	
<p>Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedia sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dalam www.opendata.kpu.go.id yang menyediakan 9 Topik dengan 155 Dataset yang dapat diakses oleh publik. 2. Telah dilaksanakan uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi 	<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun portal Open Data KPU yang telah mengintegrasikan data-data terkait Pemilu. KPU juga telah berupaya menindaklanjuti sebagian masukan dari daftar data dan topik yang menjadi rekomendasi Perludem untuk dapat disediakan dalam portal Open Data KPU.</p> <p>Penilaian maksimal tidak diberikan karena terkait dengan implementasi penyajian data SIREKAP,</p>	<p>KPU perlu untuk melakukan uji coba pelaksanaan visualisasi hasil SIREKAP untuk memastikan data yang ditampilkan SIREKAP dapat tersedia dalam format Open Data. KPU kedepannya juga diharapkan dapat melengkapi topik dan dataset yang tersedia dalam portal Open Data KPU, untuk mendorong transparansi serta</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>(SIREKAP) di TPS Kabupaten Bandung.</p> <p>3. Sistem informasi penyelenggaraan pemilu telah tersedia pada www.opendata.kpu.go.id dan Perludem telah membuat laporan penelitian dan policy brief terkait sistem informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka.</p> <p>4. Perludem telah menyusun rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.</p>	<p>KPU belum melakukan uji coba sampai dengan penyajian data yang melibatkan Perludem atau perwakilan Masyarakat Sipil.</p>	<p>akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.</p>
<p>Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan</p>		<p>1. Sistem keterbukaan informasi pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis</p>	<p>Implementasi komitmen ini mendapatkan tantangan karena adanya perubahan prioritas kebijakan dari</p>	<p>Kementerian Kesehatan dengan INFID perlu melakukan komunikasi terkait konsentrasi</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data		<p>data telah tersedia melalui <i>dashboard</i> dalam platform Satu Sehat yang dikembangkan Kemenkes.</p> <p>2. Sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan survei pengumpulan persepsi umum dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis data dan M-KIA kepada publik.</p>	<p>Kementerian Kesehatan melalui <i>Digital Transformation Office (DTO)</i>.</p> <p>Upaya untuk melakukan digitalisasi terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berbasis pada data KIA belum menjadi prioritas pengerjaan karena saat ini DTO Kemenkes berfokus untuk mengintegrasikan berbagai layanan aplikasi kesehatan yang dimiliki Kementerian Kesehatan terlebih dahulu.</p> <p>Untuk saat ini, INFID juga telah berperan dalam sosialisasi dan partisipasi dalam pengembangan platform yang mendukung kebutuhan kelompok perempuan, ibu, dan anak melalui survei pengumpulan persepsi.</p>	<p>pengembangan platform untuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi kedepannya. Melalui adanya DTO Kemenkes dan pengembangan aplikasi atau layanan kesehatan, diharapkan keterlibatan masyarakat sipil dapat terus dijamin untuk mendorong hadirnya layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat.</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran Penanganan COVID-19		<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah yang dapat diakses oleh publik telah tersedia dalam portal keuda.kemendagri. 2. Portal informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di tingkat pusat yang dapat diakses oleh publik telah tersedia dalam portal pen.kemenkeu.go.id. 3. Kolaborasi terlaksana melalui penyusunan dan penyampaian kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran dan diskusi/FGD yang dilaksanakan melalui 	<p>Kementerian Keuangan telah membuat portal untuk transparansi data keuangan untuk COVID-19 melalui portal www.pen.kemenkeu.go.id. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah membangun portal informasi anggaran penanganan COVID-19 di tingkat daerah melalui portal keuda.kemendagri.go.id. Namun, kedua portal belum dapat menyajikan data-data dalam bentuk Open Data serta informasi yang disajikan masih sangat terbatas dan belum dapat diperbaharui secara berkala, khususnya dalam portal Kemendagri. Saat ini, pelaporan keuangan daerah yang dapat diakses terkini diperbaharui pada 11 Juni 2021.</p>	<p>Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu memastikan data keuangan untuk penanganan COVID-19 dapat tersedia dalam format Open Data. Hal tersebut menjadi penting untuk memastikan data yang dipublikasikan dapat diolah untuk seluruh pemangku kepentingan sehingga meningkatkan akuntabilitas program-program penanganan COVID-19.</p>

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		webinar dan audiensi kepada Kemenkeu.		
Komitmen 16: Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat		Direktorat Instrumen HAM telah melibatkan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kajian substansi Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).	Komitmen mendapatkan nilai administratif baik karena Direktorat Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI telah melibatkan masyarakat sipil (IKOHI) dalam pembahasan terkait RUU KKR dan untuk penyusunan kajian substansi.	Sebagai tindak lanjut, pada RAN OGI VII Tahun 2023-2024, komitmen terkait RUU KKR kembali diangkat. Di saat RAN OGI VI fokus terhadap kajian substansi untuk mendukung Naskah Akademik dan RUU KKR, RAN OGI VII akan fokus terhadap penyusunan Naskah Akademik dengan pelibatan bermakna dari masyarakat.
Komitmen 17: Pemanfaatan Data Beneficial Ownership		1. Telah tersedia basis data BO yang dapat diakses oleh publik yang dikembangkan oleh Kemenkumham pada portal bo.ahu.go.id .	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuka data terkait Beneficial Ownership melalui Portal yang telah disediakan. Publik dapat mengakses portal tersebut untuk mengetahui secara terbatas	Pelibatan pelaksanaan aksi Beneficial Ownership memerlukan kolaborasi dari berbagai macam <i>stakeholders</i> . Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil juga perlu mendapatkan bagian yang

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
		<p>2. Telah terlaksana pemanfaatan data BO sebesar 57,5% dengan indikator jumlah akses layer APH, jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif, dan jumlah PBJ yang data BO korporasi pesertanya terverifikasi.</p> <p>3. Peran aktif telah dilakukan dengan dilaksanakannya berbagai rapat koordinasi. PWYP telah melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan <i>lesson learnt</i> pelaksanaan Aksi BO dalam Rencana Aksi untuk periode 2021-2022.</p>	<p>data-data Beneficial Ownership dari suatu korporasi.</p> <p>Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong tingkat pelaporan Beneficial Ownership. Hingga saat ini, baru sebesar 38% korporasi yang telah mendeklarasikan data BO. Hal ini perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan keterbukaan data BO dalam portal yang telah disediakan. Semakin tingginya data deklarasi pemilik manfaat (data BO), maka dapat lebih membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang memanfaatkan data BO tersebut.</p>	<p>cukup besar, khususnya dalam rangka sosialisasi maupun memberikan rekomendasi terkait upaya peningkatan pelaporan Beneficial Ownership.</p>
Komitmen 18:		1. Telah tersedia hasil penelitian terkait	Komitmen mendapatkan nilai administratif baik karena	Berdasarkan catatan dari OMS, pembahasan awal

Komitmen	Penilaian Pelaksanaan Komitmen	Bukti Pendukung	Alasan Pemberian Penilaian	Tindak Lanjut
<p>Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan</p>		<p>jaminan keterbukaan ruang kewargaan dalam lingkup keadilan restoratif yang disusun secara ko-kreasi antar Kementerian PPN/Bappenas dan OMS Sektor Keadilan.</p> <p>2. Telah terlaksana <u>FOCUS Group Discussion (FGD)</u> terkait kerangka keadilan restoratif dalam implementasi perluasan ruang kewargaan di Indonesia.</p>	<p>Kementerian PPN/Bappenas bersama OMS berhasil menyusun hasil penelitian terkait jaminan keterbukaan ruang kewargaan dalam lingkup keadilan restoratif. Penelitian dilakukan dalam lingkup tersebut karena adanya kekhawatiran terkait angka kriminalisasi yang tinggi terhadap aktivis serta pemangku kepentingan yang melaksanakan haknya untuk berekspresi dan berkumpul, sebagaimana tergambar dalam <i>Co-Creation Brief IRM 2022</i>. Penyusunan hasil penelitian telah dilakukan dengan proses ko-kreasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.</p>	<p>komitmen pada saat proses penyusunan RAN OGI VI tidak melibatkan OMS yang bergerak di isu perluasan ruang kewargaan, sehingga fokus dari kajian terkait perluasan ruang kewargaan selama periode sebelumnya terbatas pada ranah keadilan restoratif. Setelah RAN OGI VI, diharapkan K/L dan OMS dapat melanjutkan kerja sama membuat kajian dan rekomendasi untuk menjamin keterbukaan ruang kewargaan dalam lingkup lebih luas, serta dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.</p>

V. Pembelajaran

Sepanjang proses penyusunan RAN OGI VI Tahun 2020-2022, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk penyusunan dan implementasi RAN OGI kedepannya, yaitu:

1. Penyusunan RAN OGI perlu memastikan kesiapan sumber daya baik dari Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Dalam penyusunan RAN OGI VI, hal tersebut belum mendapatkan perhatian yang signifikan. Permasalahan sumber daya menjadi suatu tantangan tersendiri karena mempengaruhi kemampuan pemangku kepentingan dalam melaksanakan komitmen dari awal hingga akhir periode.
2. Perlunya pemetaan pemangku kepentingan yang tepat dan akurat untuk melaksanakan komitmen. Selain penting untuk memastikan kesiapan sumber daya, penyusun RAN OGI juga perlu memastikan pemangku kepentingan yang diidentifikasi tepat sasaran agar komitmen dapat disusun dengan baik dan relevan, dan komitmen dapat dijalankan oleh pemangku kepentingan yang berwenang. Pada RAN OGI VI, ada beberapa komitmen yang mengalami kendala pelaksanaan karena pemangku kepentingan memiliki wewenang, tugas, maupun fungsi yang tidak sesuai dengan yang dipetakan dalam RAN OGI VI.
3. Pentingnya perluasan aktor nonpemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan komitmen. Dalam setiap penyusunan hingga implementasi rencana aksi nasional diharapkan terdapat pelibatan unsur nonpemerintah seperti mitra pembangunan maupun akademisi yang dapat membantu memberikan masukan dan juga strategi dalam implementasi maupun pemantauan dan evaluasi rencana aksi.

VI. Rekomendasi

Adapun catatan rekomendasi yang dapat diberikan untuk penyusunan dan implementasi RAN OGI kedepannya ialah sebagai berikut:

1. Penyelarasan siklus penyusunan RAN OGI dengan tahapan perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga perlu terus diupayakan. Jika dilakukan dengan benar, secara otomatis juga akan membantu pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan (*good governance*).
2. Proses penyusunan harus dapat memperhatikan kemampuan sumber daya serta arah kebijakan dari setiap pemangku kepentingan, untuk memastikan rencana aksi yang akan disusun dan ditetapkan memungkinkan dilakukan secara ko-kreasi bagi setiap pemangku kepentingan.
3. Pelibatan aktor nonpemerintah lainnya perlu dilakukan dalam setiap rangkaian kegiatan rencana aksi untuk memberikan masukan, panduan, serta strategi dalam mengatasi permasalahan dalam komitmen-komitmen rencana aksi.